

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Provinsi Di Indonesia

Tony Putra

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: tonymoly1412@gmail.com

Sayifullah Sayifullah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: sayifullah@untirta.ac.id

Rizal Syaifudin

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: rizal92@untirta.ac.id

Korespondensi penulis: tonymoly1412@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study was to determine the effect of regional original income, general allocation funds, special allocation funds, profit sharing funds, and local government spending on poverty alleviation in provinces in Indonesia. The research method uses quantitative methods. The research data source is secondary data in the form of panel data, namely provincial data in Indonesia for the period 2017-2021 obtained from the Indonesian Central Bureau of Statistics. Analysis of research data using panel data regression analysis. The results of the partial hypothesis test with the t test, it is known that the variables of local revenue, profit sharing and local government spending have a partially significant effect on poverty alleviation. Meanwhile, the general allocation fund and special allocation fund do not have a partial significant effect on poverty alleviation. The results of the F test show that regional original income, general allocation funds and special allocation funds, profit-sharing funds and local government spending have a significant simultaneous effect on poverty alleviation in provinces in Indonesia in 2017-2021.*

Keywords: *Poverty Alleviation, Local Own Revenue, Profit Sharing Funds, Regional Government Expenditures.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja pemerintah daerah terhadap pengentasan kemiskinan pada Provinsi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Sumber data penelitian adalah data sekunder dalam bentuk data panel, yaitu data Provinsi di Indonesia dengan kurun waktu tahun 2017-2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Analisis data penelitian menggunakan analisis regresi data panel. Hasil uji hipotesis parsial dengan uji t, diketahui variabel pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengentasan kemiskinan. Sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengentasan kemiskinan. Hasil uji F, diketahui pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengentasan kemiskinan pada provinsi di Indonesia tahun 2017-2021.

Kata kunci: Pengentasan Kemiskinan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Belanja Pemerintah Daerah.

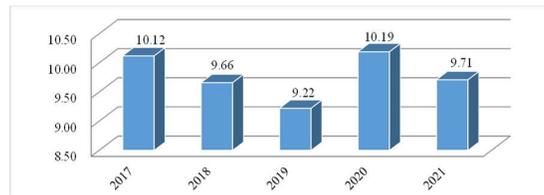
LATAR BELAKANG

Kemiskinan menjadi salah satu masalah dalam ekonomi, sehingga harus diatasi atau paling tidak dikurangi. Alamanda (2020) Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu. Kemiskinan sudah sejak lama menjadi persoalan yang cukup besar, dimana hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Arsyad (2020:299) menyatakan kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa

bebas. Secara luas kemiskinan adalah keterbatasan atau kekurangan yang di sandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi kehidupan.

Badan Pusat Statistik (2021:182) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Dari sisi makanan, indikator terkait dengan kebutuhan Gizi sebesar 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non-makanan mencakup pada sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Wijayanti (2015:215) menjelaskan kemiskinan tercermin dalam kondisi seseorang yang mengalami kekurangan gizi, perumahan tidak layak huni, rendahnya kesehatan, dan pendidikan rendah. Selain itu, kemiskinan sebagai suatu permasalahan juga akan menyebabkan permasalahan baru, seperti memperbesar angka pengangguran, memperbesar resiko kriminalitas dan lain sebagainya.

Rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 1.



Sumber : Data diolah, 2023

Gambar 1. Rata-rata Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2017-2021 (%)

Berdasarkan Gambar 1, diketahui rata-rata tingkat kemiskinan yang ditunjukkan dari jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni tahun 2017-2021 mengalami kondisi fluktuatif dengan tren menurun. Tercatat peningkatan persentase tingkat kemiskinan terjadi di tahun 2020 menjadi sebesar 10.19% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diduga disebabkan oleh efek pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di seluruh dunia, tidak terkecuali Negara Indonesia yang mengalami kelesuan ekonomi dengan akumulasi peningkatan persentase penduduk miskin di tiap daerah (Fitriyanti, 2020). Kemudian di tahun 2021, tingkat kemiskinan mengalami penurunan kembali meski tidak signifikan menjadi sebesar 9.71% dibandingkan tahun sebelumnya yang diduga kegiatan perekonomian di Indonesia mulai pulih kembali.

Faktor yang dinilai dapat berkontribusi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan pada daerah-daerah di Indonesia adalah desentralisasi fiskal. Mulyono dalam Hiktaop (2015) menyatakan desentralisasi fiskal adalah proses pendistribusian penganggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung melaksanakan tugas dan tanggung jawab keadministrasian yang didelegasikan. Gumelar (2021) menyatakan tujuan desentralisasi fiskal adalah melalui pembagian kewenangan yang

lebih besar untuk tingkat pemerintahan yang lebih rendah adalah efisiensi alokasi pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan atau preferensi bagi daerah yang terkait selaku penerima manfaat sehingga dapat menjamin tercukupinya kebutuhan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemutusan rantai lingkaran kemiskinan memerlukan peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah perlu mengambil langkah intervensi ekonomi sebagaimana teori Keynes. Kadafi (2020) menyatakan peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ditunjukkan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Pada komponen *revenue assignment* (pendapatan) pada tiap pemerintah daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mardiasmo (2016:135) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan.

Agatha (2021) menyatakan dukungan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat guna mengurangi tingkat kemiskinan dilakukan dengan pemberian dana transfer (*intergovernmental transfers*) yang diperoleh dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana transfer yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya, dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang keseluruhnya bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah.

Sumber dana yang telah terkumpul akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran (*expenditure assignment*) pelaksanaan program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan maupun untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan publik secara luas (Kartika dkk, 2021). Peranan pengeluaran pemerintah di Negara berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas sehingga peranan pemerintah sangat penting. Sasana (2016:41) mengemukakan belanja pemerintah menjadi salah satu investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara mengalokasikan pendanaan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan di daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja pemerintah daerah terhadap pengentasan kemiskinan pada Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021.

KAJIAN TEORITIS

Teori Kemiskinan

Revallion (2016:38) menyatakan kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak memiliki dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Sedangkan Arsyad (2020:299) menyatakan kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas. Badan Pusat Statistik (2021:182) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Kebutuhan dasar hidup meliputi kebutuhan pemenuhan makanan kebutuhan pemenuhan sandang, kebutuhan pemenuhan tempat tinggal, kebutuhan pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar ,jika masyarakat berada pada kondisi yang miskin, maka masyarakat tersebut berarti tidak mampu mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut sehingga hidupnya menjadi tidak sejahtera atau tidak layak, dengan kata lain hidup dalam kondisi miskin. Terdapat teori-teori kemiskinan antara lain:

Teori Lingkaran kemiskinan, adalah suatu lingkaran suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik (Agatha, 2021). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, baik investasi manusia maupun investasi kapital. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse 1953, yang mengatakan “ *a poor country is a poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Teori Sosial Demokrat, teori ini memandang kemiskinan bukanlah persoalan individu, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses kelompok kepada sumber kemasyarakatan (Panggabean dkk, 2022). Teori sosial demokrat menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar bagi seluruh warga negara dan dipengaruhi oleh pendekatan ekonomi manajemen permintaan gaya Keynesian. Meskipun teori ini tidak setuju sepenuhnya terhadap pasar bebas, kaum sosial demokrat tidak anti sistem ekonomi kapitalis. Bahkan kapitalis masih dipandang sebagai bentuk organisasi ekonomi yang

paling efektif. Hanya saja sosial demokrat merasa perlu adanya suatu sistem negara yang dapat mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Teori Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Mardiasmo, 2016). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah. Mardiasmo (2016:128) menjelaskan terdapat tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah, yaitu menciptakan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Prinsip penerapan desentralisasi bertujuan untuk mengefisienkan sektor publik dalam pelayanan dan produksi, meningkatkan akuntabilitas dan respon terhadap kebutuhan serta kondisi lokal, hal ini yang mendorong desentralisasi dilaksanakan. Litvack dalam Kurniawan (2015:972) menyatakan secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas tiga jenis antara lain:

1. Desentralisasi Politik

Merupakan pelimpahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan yang artinya demokrasi memberikan pilihan kepada warga negara tentang bagaimana sumber daya digunakan dan pelayanan diberikan dalam komunitasnya. Desentralisasi politik terlihat di dalam pemerintahan lokal otonom yang meningkatkan kesempatan partisipasi dan akuntabilitas, melalui peningkatan legitimasi demokrasi dan pendalaman demokrasi dalam konteks pelaksanaan desentralisasi politik.

2. Desentralisasi Administrasi

Merupakan pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan, artinya yaitu tidak mungkin di dalam pengambilan semua keputusan seluruh wilayah ditentukan oleh pemerintah pusat karena seperti kita ketahui pemerintah pusat sering kali kekurangan atau keterlambatan mendapatkan informasi dari suatu daerah. Oleh karena itu desentralisasi ini perlu digunakan agar dapat merestribusikan kewenangan, tanggung jawab dan sumber daya finansial dalam menyediakan pelayanan publik di tingkat pemerintahan.

3. Desentralisasi Fiskal

Merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi secara konseptual. Artinya desentralisasi fiskal membuat suatu daerah untuk mengelola keuangannya sendiri agar lebih mandiri.

Desentralisasi fiskal menjadi salah satu kebijakan yang muncul akibat penerapan otonomi daerah yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, mencakup tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Kebijakan desentralisasi fiskal sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tujuan antara lain:

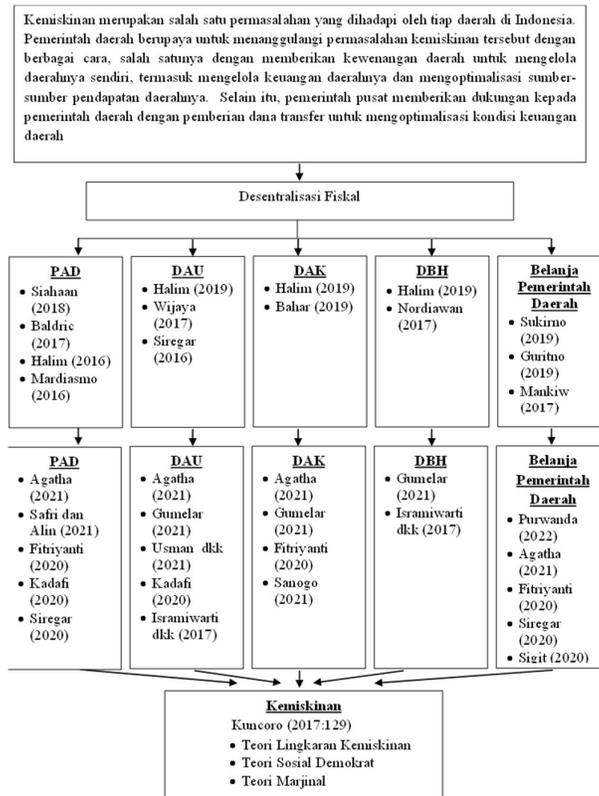
1. Menyelaraskan dengan kebijakan ketahanan fiskal yang berkesinambungan (*fiscalsustainable*).
2. Memperkecil ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical imbalance*).
3. Mengoreksi ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangan (*horizontal imbalance*).
4. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik (demokrasi).

Bahl dalam Agatha (2021) menyatakan desentralisasi fiskal terdiri atas *revenue assignment* (pendapatan) yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), *intergovernmental transfers* (dana transfer pemerintah pusat) yang diperoleh dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana transfer yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya, dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang keseluruhnya bersumber dari pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah, dan *expenditure assignment* (pengeluaran) yang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk belanja daerah. Komponen *revenue assignment* (pendapatan) dari desentralisasi fiskal yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki perbedaan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Perbedaan Komponen Pendapatan (Revenue) Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana Bagi Hasil (DBH)
PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah	DAU merupakan suatu dana perimbangan yang memiliki tujuan utama dalam pengurangan kesenjangan fiskal antar daerah dengan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah terkait	DAK merupakan bentuk transfer pusat guna mendanai kewenangan yang telah di desentralisasikan, yang juga sekaligus mengemban tugas untuk mendukung prioritas nasional. DAK memiliki karakter yang paling spesifik di antara dana transfer lainnya, dimana DAK (Dana Alokasi Khusus) hanya dapat digunakan sesuai dengan menu kegiatan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis terkait bidang alokasi DAK	DBH merupakan suatu dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, umumnya terkait dengan pajak seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, pertambangan, kehutanan dan perikanan

Sumber : Data diolah peneliti, 2023



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Variabel PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengentasan kemiskinan pada Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021.
2. Variabel PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengentasan kemiskinan pada Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya. Adapun desain penelitian menggunakan desain kausal, yaitu desain untuk menganalisa hubungan sebab akibat variabel bebas terhadap variabel tetap atau bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel tetapnya (Sugiyono, 2018).

Jenis data penelitian adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau numerik. Data dalam penelitian ini terdiri dari data sebagai berikut :

- 1) Data kemiskinan diperoleh dari data penduduk miskin menurut Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021 dengan satuan persen.
- 2) Data pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh dari data jumlah PAD menurut Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021 dengan satuan juta rupiah.
- 3) Data dana alokasi umum (DAU) diperoleh dari data DAU menurut Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021 dengan satuan juta rupiah.
- 4) Data dana alokasi khusus (DAK) diperoleh dari data DAK menurut Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021 dengan satuan juta rupiah.
- 5) Data dana bagi hasil (DBH) diperoleh dari data DBH menurut Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021 dengan satuan juta rupiah.
- 6) Data belanja pemerintah daerah diperoleh dari data realisasi pengeluaran (*expenditure*) belanja pemerintah menurut provinsi di Indonesia tahun 2017-2021 dengan satuan juta rupiah.

Sumber data penelitian adalah data sekunder dalam bentuk data panel, yaitu data *cross section* (Provinsi di Indonesia) dan data *time series* (periode pengamatan dari tahun 2017-2021) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Data panel adalah gabungan antara data *Cross section* dan data *time series* pada suatu variabel tertentu dinamakan panel data (Winarno, 2016).

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi atau laporan data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia berkaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh referensi dan dasar teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yang diperoleh dari buku literatur dan jurnal penelitian untuk memperkuat landasan empiris dalam penelitian ini.

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda data panel dengan menggunakan program statistik Eviews versi 8. Persamaan model penelitian ini sebagai berikut:

$$KMS_{it} = \alpha + \beta_1 LN.PAD_{it} + \beta_2 LN.DAU_{it} + \beta_3 LN.DAK_{it} + \beta_4 LN.DBH_{it} + \beta_4 LN.BPD_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

KMS	= Variabel Kemiskinan
LN.PAD	= Variabel Logaritma Natural PAD
LN.DAU	= Variabel Logaritma Natural Dana Alokasi Umum
LN.DAK	= Variabel Logaritma Natural Dana Alokasi Khusus
LN.DBH	= Variabel Logaritma Natural Dana Bagi Hasil
LN.BPD	= Variabel Logaritma Natural Belanja Pemerintah Daerah
β_0	= Konstanta
β_i	= Koefisien regresi variabel bebas
i	= unit <i>cross-section</i> (i = Provinsi di Indonesia)
t	= Unit <i>time-series</i> sebanyak t (t = tahun 2017-2021)
ϵ	= <i>Error term</i>

Uji hipotesis menggunakan uji t (uji parsial) untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tetap secara parsial. Kriteria uji t sebagai berikut :

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$, maka tolak H_0 dan tidak tolak H_a , artinya terdapat pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja pemerintah secara parsial terhadap pengentasan kemiskinan pada Provinsi di Indonesia.

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} \geq -t_{tabel}$, maka tidak tolak H_0 dan tolak H_a , artinya tidak terdapat pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja pemerintah secara parsial terhadap pengentasan kemiskinan Provinsi di Indonesia.

Selain itu, uji hipotesis penelitian juga menggunakan uji F (uji simultan) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tetap secara simultan. Kriteria uji F sebagai berikut :

Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka tolak H_0 dan tidak tolak H_a , artinya terdapat pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja pemerintah secara simultan terhadap pengentasan kemiskinan pada Provinsi di Indonesia.

Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka tidak tolak H_0 dan tolak H_a , artinya tidak terdapat pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja pemerintah secara simultan terhadap pengentasan kemiskinan pada Provinsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Metode Pemilihan Model

Keputusan memilih model regresi yang akan digunakan dalam analisis regresi data panel didasarkan pada hasil dari dua pengujian, yaitu uji *chow test* dan *hausman test* yang dijelaskan berikut ini.

1. Chow Test

Uji *Chow Test* adalah alat uji untuk mengetahui apakah model CEM atau FEM yang akan dipilih untuk melakukan estimasi data. Uji ini dapat dilakukan dengan uji *restriced F-Test* atau *Chow-Test*. Hasil pengujian *Chow Test* disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	704,784876	(33.130)	0,0000
Cross-section Chi-square	877,522303	33	0,0000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Eviews 8

Berdasarkan Tabel 2, diketahui probabilitas *Cross Section F* sebesar $0,000 < 0,05$, maka tolak H_0 dan tidak tolak H_a (Gujarati, 2015:252). Artinya model yang layak digunakan untuk estimasi model penelitian adalah *Fixed Effect Model*.

2. Hausman Test

Uji Hausman Test digunakan untuk menentukan apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang akan dipilih. Hasil pengujian *Hausman Test* disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	704,784876	(33.130)	0,0000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Eviews 8

Berdasarkan Tabel 3, diketahui probabilitas *Hausman Test* sebesar $0,000 < 0,05$, maka tolak H_0 dan tidak tolak H_a (Gujarati, 2015:253). Artinya model yang layak digunakan untuk estimasi model penelitian adalah *Fixed Effect Model*.

Hasil uji chow dan uji hausmant diatas, menjelaskan bahwa model regresi data panel yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM) yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Data Panel Dengan *Fixed Effect Model* (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.81971	4.671554	6.811375	0.0000
X1_PAD?	-0.025619	0.010854	-2.360375	0.0197
X2_DAU?	0.012780	0.011653	1.096695	0.2748
X3_DAK?	0.015836	0.008428	1.879026	0.0625
X4_DBH?	-0.025620	0.011285	-2.270205	0.0248
X5_BPD?	-1.323226	0.295455	-4.478610	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_BABEL--C	-6.837869	_LAMPUNG--C	2.086046	
_BALI--C	-6.000098	_MALUKU--C	5.906062	
_BANTEN--C	-4.060401	_MALUT--C	-5.191391	
_BENGKULU--C	3.490571	_NAD--C	6.102632	
_DIY--C	1.194953	_NTB--C	3.679597	
_DKI--C	-3.202264	_NTT--C	10.01621	
_GORONTALO--C	3.725943	_PAPUA--C	17.61283	
_JABAR--C	-0.555020	_PAPUABRT--C	11.78461	
_JAMBI--C	-3.358626	_RIAU--C	-2.901068	
_JATENG--C	2.731626	_SULBAR--C	-0.867128	
_JATIM--C	2.515342	_SULSEL--C	-1.045668	
_KALBAR--C	-3.280396	_SULTENG--C	1.944413	
_KALSEL--C	-5.987836	_SULTRA--C	0.285130	
_KALTENG--C	-5.927330	_SULUT--C	-3.646876	
_KALTIM--C	-3.927732	_SUMBAR--C	-4.315533	
_KALUT--C	-4.976967	_SUMSEL--C	2.659640	
_KEPRIAU--C	-5.400736	_SUMUT--C	-0.730105	

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.995272	Durbin-Watson stat	1.786621
F-statistic	720.1753	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Eviews 8

Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji t

Uji t (uji parsial) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel tetapnya atau untuk dapat menguji hipotesis penelitian. Hasil pengujian hipotesis t-statistik disajikan pada Tabel 5

Tabel 5. Uji t-statistik

Variabel Bebas	t _{hitung}	t _{tabel}	Prob	α	Kriteria	Keputusan
Pendapatan Asli Daerah (X1)	-2,360	-1,974	0,0197	0,025	Signifikan	Tolak H ₀
Dana Alokasi Umum (X2)	1,096	1,974	0,2748	0,025	Tidak Signifikan	Tidak Tolak H ₀
Dana Alokasi Khusus (X3)	1,879	1,974	0,0625	0,025	Tidak Signifikan	Tidak Tolak H ₀
Dana Bagi Hasil (X4)	-2,270	-1,974	0,0248	0,025	Signifikan	Tolak H ₀
Belanja Pemerintah Daerah (X5)	-4,478	-1,974	0,0000	0,025	Signifikan	Tolak H ₀

Keterangan : tingkat signifikan $\alpha = 5$ persen, $n = 169$ dan $k = 5$ maka $df = n - k$ ($169 - 5$) = 164 diperoleh nilai t_{tabel} untuk uji 2 pihak sebesar 1,974 atau -1,974

Berdasarkan Tabel 5, maka dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan pengujian hipotesis secara parsial yang antara lain :

a. Pengaruh PAD Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Provinsi di Indonesia

Variabel pendapatan asli daerah (PAD) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,360 dan signifikansi sebesar 0,0197. Jika nilai $-t_{\text{hitung}} (-2,360) < -t_{\text{tabel}} (-1,974)$ maka tolak H_0 dan tidak tolak H_a . Artinya variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan pada provinsi di Indonesia tahun 2017-2021.

b. Pengaruh DAU Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Provinsi di Indonesia

Variabel dana alokasi umum (DAU) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,096 dan probabilitas sebesar 0,274. Jika nilai $t_{\text{hitung}} (1,096) < t_{\text{tabel}} (1,974)$ maka tidak tolak H_0 dan tolak H_a . Artinya variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan pada provinsi di Indonesia tahun 2017-2021.

c. Pengaruh DAK Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Provinsi di Indonesia

Variabel dana alokasi khusus (DAK) memperoleh t_{hitung} sebesar 1,879 dan probabilitas sebesar 0,0625. Jika nilai $t_{\text{hitung}} (1,879) < t_{\text{tabel}} (1,974)$ maka tidak tolak H_0 dan tolak H_a . Artinya variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan pada provinsi di Indonesia tahun 2017-2021.

d. Pengaruh DBH Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Provinsi di Indonesia

Variabel dana bagi hasil (DBH) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,270 dan probabilitas sebesar 0,024. Jika nilai $-t_{\text{hitung}} (-2,270) < -t_{\text{tabel}} (-1,974)$ maka tolak H_0 dan tidak tolak H_a . Artinya variabel dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan pada provinsi di Indonesia tahun 2017-2021.

e. Pengaruh BPD Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Provinsi di Indonesia

Variabel belanja pemerintah daerah memperoleh nilai t_{hitung} sebesar -4,478 dan probabilitas sebesar 0,000. Jika nilai $-t_{\text{hitung}} (-4,478) < -t_{\text{tabel}} (-1,974)$ maka tolak H_0 dan tidak tolak H_a . Artinya variabel belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan pada provinsi di Indonesia tahun 2017-2021.

2. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel bebas secara simultan terhadap variabel tetapnya. Kriteria uji F dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Hasil pengujian hipotesis simultan disajikan pada Tabel 6

Tabel 6. Uji F-statistik

Variabel Bebas	F _{hitung}	F _{Tabel}	Prob	α	Kriteria	Keputusan
PAD (X1)	720,1753	2,270	0,000	0,05	Signifikan	Tolak Ho
DAU (X2)						
DAK (X3)						
DBH (X4)						
BPD (X5)						

Keterangan : Tingkat signifikansi $\alpha = 5$ persen dengan $df = n - k - 1$ ($169 - 5 - 1 = 163$) diperoleh nilai F_{Tabel} sebesar 2.270

Berdasarkan Tabel 6, diketahui nilai F_{hitung} sebesar 720,175 dan nilai probabilitas sebesar 0,000. Jika nilai F_{hitung} ($720,175$) $>$ F_{tabel} ($2,270$) maka tolak H_0 dan tidak tolak H_a . Artinya variabel PAD, DAU, DAK, DBH dan belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengentasan kemiskinan pada provinsi di Indonesia tahun 2017-2021.

3. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel tetap yang dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan Tabel 4.7, diketahui bahwa nilai *R Squared* sebesar 0,995272. Hal ini menunjukkan variasi variabel pengentasan kemiskinan pada provinsi di Indonesia dapat dijelaskan sebesar 99.52% oleh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan belanja pemerintah daerah, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

Pembahasan Hasil

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Provinsi di Indonesia

Hasil penelitian ini menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan pada provinsi di Indonesia tahun 2017-2021. Selain itu, hasil penelitian ini senada dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Safri (2021), Usman (2021), Fitriyanti (2020), Syamsul (2020), Ridwan dkk (2017), dan Isramiwarti dkk (2017) dengan hasil penelitian yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah sebagai sumber keuangan daerah yang digali dan diperoleh dari potensi yang dimiliki oleh tiap daerah atau provinsi di Indonesia. Semakin besar pendapatan asli daerah maka akan semakin besar pula kemampuan daerah untuk mendanai pelaksanaan program pembangunan di daerahnya, baik yang bersifat pembangunan fisik seperti pembangunan infrastruktur dan pembangunan non fisik seperti pelayanan publik yang dapat menstimulasi dan mengoptimalkan kegiatan perekonomian pada suatu daerah. Perekonomian daerah yang berputar dengan dinamis akan membuat masyarakat memperoleh pendapatan melalui hasil

yang diperolehnya dari bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendasar sehingga tingkat kemiskinan di daerah tersebut akan semakin rendah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Provinsi di Indonesia

Hasil penelitian ini menyatakan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan pada provinsi di Indonesia tahun 2017-2021. Selain itu, hasil penelitian ini senada dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gumelar (2021), Usman dkk (2021), Kadafi (2020), Ridwan dkk (2017) dan Isramiwarti (2017) dengan hasil penelitian yang menyatakan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum sebagai salah satu dana transfer pemerintah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan ketentuan daerah yang memiliki sumber fiskal dengan jumlah yang cenderung besar akan menerima transfer dana alokasi umum yang relatif kecil, sedangkan daerah dengan sumber fiskal yang cenderung kecil maka akan menerima transfer dana alokasi umum yang relatif besar. Adanya perbedaan besarnya dana alokasi umum dan sifatnya hanya sebagai penyokong keuangan daerah atas sumber fiskal utamanya, yakni pendapatan asli daerah menyebabkan kontribusi dana alokasi umum menjadi tidak signifikan bagi daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerahnya.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Provinsi di Indonesia

Hasil penelitian ini menyatakan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan pada provinsi di Indonesia tahun 2017-2021. Selain itu, hasil penelitian ini senada dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Panggabean dkk (2022), Gumelar (2021), Agatha (2021), Rasu dkk (2019), dan Ridwan (2017) dengan hasil penelitian yang menyatakan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dana transfer pemerintah yang diantaranya berupa dana alokasi khusus yang diberikan sebagai pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana penggunaan anggaran tersebut sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dana alokasi khusus sebagai anggaran yang ditransfer kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat bertujuan agar daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana fisik sebagai target nasional dalam meningkatkan kemampuan ekonomi dan fasilitas publik di tiap daerah. Hal ini menandakan dana alokasi khusus hanya diberikan kepada daerah-daerah yang bersinggungan dengan target nasional, seperti pembangunan infrastruktur maupun peningkatan pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah yang tertinggal, sedangkan daerah lain yang tidak

bersinggungan dengan target nasional tersebut tidak memperoleh dana alokasi khusus. Adanya perbedaan dalam pemberian dana alokasi khusus tersebut, dimana ada daerah yang tidak mendapatkan dana alokasi khusus, seperti provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang tidak mendapatkan dana alokasi khusus sejak tahun 2019-2021, provinsi Nusa Tenggara Barat yang tidak mendapatkan dana alokasi khusus sejak tahun 2020-2021, provinsi Kepulauan Riau dan provinsi Jawa Barat yang tidak mendapatkan dana alokasi khusus tahun 2017, serta provinsi lainnya yang tidak mendapatkan dana alokasi khusus di tahun tertentu dan adanya daerah yang mendapatkan dana alokasi khusus, seperti provinsi Sumatera Utara, provinsi Sumatera Barat, provinsi Jawa Tengah, provinsi Banten dan provinsi lainnya yang mendapatkan dana alokasi khusus sejak tahun 2017-2021 menyebabkan kontribusi dana alokasi khusus dengan sifatnya sebagai penyokong keuangan daerah untuk pelaksanaan target nasional menyebabkan dana alokasi khusus menjadi tidak signifikan bagi daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerahnya.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Provinsi di Indonesia

Hasil penelitian ini menyatakan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan pada provinsi di Indonesia tahun 2017-2021. Selain itu, hasil penelitian ini senada dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gumelar (2021), Izzati (2021), Syamsul (2020), Rasu dkk (2019) dan Isramiwarti (2017) dengan hasil penelitian yang menyatakan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Dana bagi hasil sebagai salah satu dana tranfer pemerintah yang dialokasikan kepada daerah merupakan pembagian hasil sumber daya nasional kepada daerah yang bersangkutan dengan 2 macam, yaitu dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) dan dana bagi hasil pajak. Pendapatan dana bagi hasil pajak berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25), Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPND). Sedangkan dana bagi hasil SDA berasal dari: Pertambangan Panas Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Minyak Bumi, Perikanan, Pertambangan Umum, dan Kehutanan (Dirjen Perimbangan, 2020). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil dapat memperkuat sumber keuangan daerah dari penerimaan hasil sumber daya alam dan pajak penghasilan sehingga dapat penyokong keuangan daerah atas sumber fiskal utamanya, yakni pendapatan asli daerah menyebabkan kontribusi dana bagi hasil menjadi signifikan bagi daerah dalam pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Provinsi di Indonesia

Hasil penelitian ini menyatakan belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan pada provinsi di Indonesia tahun 2017-2021. Selain itu, hasil penelitian ini senada dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purwanda (2022), Yusri (2021), Alamanda (2020), Siregar (2020), Sasana dan Kusuma (2018), dan Isramiwarti dkk (2017) dengan hasil penelitian yang menyatakan belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah yang menjadi salah satu investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara mengalokasikan pendanaan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan di daerah. Belanja pemerintah daerah mencerminkan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan program kerja yang sudah direncanakan guna menstimulasi dan mengakselerasi kegiatan ekonomi masyarakat di daerah sehingga masyarakat memperoleh pendapatan untuk memenuhi standar kebutuhan hidupnya yang berdampak kepada penurunan angka kemiskinan di daerah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulannya adalah variabel PAD, DBH dan belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengentasan kemiskinan pada provinsi di Indonesia tahun 2017-2021. Sedangkan variabel DAU dan DAK tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengentasan kemiskinan pada provinsi di Indonesia tahun 2017-2021. Secara simultan, variabel PAD, DAU, DAK, DBH dan belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan pada provinsi di Indonesia tahun 2017-2021.

Saran penelitian diantaranya Pemerintah Provinsi di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya sektor pajak daerah tingkat provinsi yang mencakup pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dengan menginstruksikan pihak SAMSAT yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk lebih gencar melakukan razia kendaraan bermotor untuk mempercepat penyerapan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara lebih aktif, mendatangi perusahaan yang melakukan usaha dengan memanfaatkan air permukaan yang berkewajiban membayar pajak air permukaan, seperti kolam renang atau perusahaan air minum dalam kemasan dan lain sebagainya dan diharapkan pemerintah Provinsi di Indonesia dalam menyusun anggaran untuk pengeluaran daerah melalui belanja pemerintah daerah hendaknya memperkecil pos belanja pegawai dan memperbesar anggaran untuk pos belanja modal dan pembangunan sebagai bentuk

menciptakan iklim usaha yang kondusif guna menarik investor untuk berinvestasi di daerah tersebut karena lebih berkontribusi dalam menstimulasi kegiatan perekonomian daerah sehingga masyarakat dapat memperoleh peningkatan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan di suatu daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Agatha, Shellenia Vitara, Beta Andri Anggiano Uliansyah. 2021. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dalam Pengentasan Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Mediasi di Provinsi Papua. *Jurnalku*. Volume 1 Nomor 3. <https://dx.doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.30>
- Alamanda. 2020. *The Effect of Government Expenditure on Income Inequality and Poverty in Indonesia*. *Journal Homepage Info Artha*. Volume 4 Nomor 1. <https://dx.doi.org/10.31092/jia.v4i1.614>
- Astuti, Tri, Basri H, Muh Yusri Z, Madris. 2019. *The Effect of Local Revenue to Poverty Rate in Southeast Sulawesi Indonesia*. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS)*. Vol. 6 Issue 10. <https://dx.doi.org/10.22161/ijaers.610.19>
- BPS Indonesia. 2021. *Statistik Indonesia*. BPS Indonesia. Jakarta.
- Fitriyanti, Nur Ika. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*. Volume 9 Nomor 2. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Gujarati, Damodar dan Porters. 2015. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta. Erlangga.
- Gumelar, Agum. 2021. Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019). *Jurnal Ekonomi-QU*. Vol. 11 No 2. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu>
- Hiktaop, Nurcholis. 2015. *Desentralisasi Fiskal: Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Tingkat Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Isramiwarti, Riry, M. Rasull dan Taufeni Taufik. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2015. *Pekbis Jurnal*. Vol. 9 No. 3. <https://pekbis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/view/4634>
- Izzati, Anti Nur dan Lucia Rita Indrawati. 2021. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Magelang. *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*. Vol. 2 No. 4. DOI.10.1210/jpm.v2i4.139
- Kadafi, Muhammad. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2010-2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*. Volume 3 Nomor 2. http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi_regional
- Kartika, Dya Ayu Fitaloka Candra, Sebastiana V and Herman C.D. 2021. *Impact of Government Expenditure on Poverty Rate Reduction in East Java Province*. *Wiga: Journal Economics Research*. Vol. 11 Number 2. <https://ejournal.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/wiga>

- Mardiasmo. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi Offset
- Panggabean, Helena Louise dkk. 2022. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*. Vol. 6 Nomor 2. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.836>
- Purwanda, Eka. 2022. *Analysis of the Effect of Government Spending on Development Economy and Poverty Reduction in Indonesia*. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*. Vol. 5 No. 2. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5762>
- Rasu, Konny Joula Ellen. 2019. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol. 20 No. 4. <https://doi.org/10.35794/jpek.d.32803.20.4.2019>
- Revallion dan Agus W. 2016. *Ekonometrika Teori dan Terapan*. Yogyakarta. Andi
- Ridwan, Agung, Syaparuddin dan Candra Mustika. 2017. Pengaruh Sumber Pembiayaan Desentralisasi Fiskal Terhadap PDRB dan Tingkat Kemiskinan (Studi di Kabupaten Kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Paradigma Ekonomika*. Volume 12 Nomor 2. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v12i2.3944>
- Safitri, Hanifah dan Muhammad Saleh. 2020. Pengaruh Belanja Modal, Belanja Non Modal, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Kemiskinan Kalimantan Selatan. *JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Volume 3 Nomor 1. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jiep/article/view/2220>
- Safri, Muhammad and Nesity Fameylan Alin. 2021. *The Effect of Original Local Government Revenue and Economic Growth on the Poverty Level in Jambi Province*. *The First International Conference on Government Education Management and Tourism (ICoGEMT)*. Bandung City. Indonesia. <https://conference.loupiasconference.org/index.php/ICoGEMT/article/view/164>
- Sanogo, Tiangboho. 2021. *Does fiscal Decentralization Enhance Citizens' Access to Public Services and Reduce Poverty? Evidence from Côte d'Ivoire Municipalities in a Conflict Setting*. *Hal Open Science: World Development*, Elsevier. pp.204-221. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01875189>
- Sasana, Hadi. 2016. *Desentralisasi Fiskal*. Jakarta. Erlangga.
- Sasana, Hadi and Panji Kusuma. 2018. *Government Expenditure and Poverty in Indonesia*. *KnE Social Sciences: International Conference on Economics, Business and Economic Education*. <https://doi.10.18502/kss.v3i10.3125>
- Sigit, Tri Angga. 2020. Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*. Volume 5 Nomor 2. <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/download/170/131>
- Siregar, Oktarini Khamilah. 2020. Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*. Vol 11 No 2. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/793>
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

- Syamsul. 2020. Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Akuntabel*. Vol 17 No 1. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/akuntabel>
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Usman, Gunawan Bata Ilyas, and Mansur Azis. 2021. *Overcoming Poverty by Increasing Local Own Revenue and General Allocation Funds Through Economic Growth in Central Mamuju Regency. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. Sao Paulo, Brazil, April 5 – 8. <https://www.ieomsociety.org/brazil2020/papers/879>
- Wijayanti, S. 2015. *Ekonomi Pertumbuhan dan Kemiskinan*. Bandung. Alfabeta.
- Winarno, Wing Wahyu. 2016. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Yusri, Arifka. 2021. *Does Government Expenditure Affect Poverty, Health, and Education? Evidence from Aceh, Indonesia. The Indonesian Journal of Development Planning*. Volume VI Nomor 1. <https://doi.org/10.36574/jpp.v6i1.249>.